PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Public Value Pada Inovasi Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Wahyu Nur Istiqomah[1], Diana Hertati[2]
[1]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur
E-mail: wahyunuristiqomah3@gmail.com[1], diana_hertati.adneg@gmail.ac.id[2]

Article History:
Received: 05 September 2026
Revised: 16 September 2026
Accepted: 21 September 2026

Keywords: *Public Value; Pelayanan Publik; Mening Deh*

Abstrak: *Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan akses, terutama di wilayah dengan kondisi geografis pegunungan dan pesisir seperti Kabupaten Trenggalek. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengembangkan inovasi pelayanan jemput bola Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) yang menghadirkan berbagai layanan perangkat daerah langsung ke desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis public value pada pelayanan publik Mening Deh di Kecamatan Watulimo menggunakan teori Strategic Triangle Mark H. Moore (1995), yang meliputi dimensi legitimacy and support, operational capabilities, dan substantively valuable. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mening Deh memiliki legitimasi melalui regulasi daerah dan memperoleh dukungan masyarakat, meskipun penyebaran informasi belum merata serta belum memiliki SOP khusus. Kemampuan operasional program berjalan baik, namun masih terkendala jaringan internet dan kondisi cuaca. Program ini juga memberikan nilai sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan ekologi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis dan sosialisasi yang lebih merata diperlukan untuk mengoptimalkan public value Mening Deh.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kualitas pelayanan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, minimnya sarana prasarana, serta belum meratanya akses layanan, terutama pada wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan public value atau nilai publik yang dirasakan

masyarakat sebagai penerima layanan (Hasanah et al. 2024).

Isu pemerataan pelayanan publik masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Trenggalek. Meskipun Provinsi Jawa Timur memperoleh predikat A dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,75 pada tahun 2025, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pelayanan di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Trenggalek memiliki karakteristik wilayah pesisir dan pegunungan yang menyebabkan sebagian masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengakses layanan perangkat daerah. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat yang tercermin dari skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia sebesar 38,54 (BPSDM Komdigi 2025) turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan berbasis digital.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya persoalan pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek. Vanessa et al. (2026) menemukan bahwa Program Mening Deh telah didukung komitmen kepemimpinan yang baik, tetapi masih lemah pada aspek regulasi teknis dan struktur kelembagaan. Supriyanto (2023) dalam penelitiannya tentang Program GERTAK mengungkap kendala berupa rendahnya literasi teknologi dan minimnya keterlibatan kelompok sasaran. Pratama dan Rahaju (2022) menemukan keterbatasan armada layanan administrasi keliling akibat kondisi medan yang berbukit-bukit. Sementara itu, Lestari et al. (2025) menunjukkan bahwa aplikasi SIMINAKSOPAL dan Program JEMPOL KEREN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek masih menghadapi kendala gangguan jaringan dan sulitnya akses lokasi.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan inovasi Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) pada tahun 2023 sebagai pelayanan berbasis jemput bola yang menghadirkan berbagai layanan perangkat daerah langsung di desa-desa, khususnya wilayah terpencil. Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kebutuhan administrasi, kesehatan, sosial, dan layanan lainnya dapat diakses dengan lebih mudah.

Penelitian ini menggunakan perspektif *public value* dari Mark H. Moore (1995) melalui konsep *Strategic Triangle* yang meliputi tiga dimensi, yaitu *legitimacy and support*, *operational capabilities*, dan *substantively valuable*. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program publik memperoleh legitimasi dan dukungan, memiliki kapasitas operasional yang memadai, serta menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai Mening Deh masih terbatas pada aspek implementasi program dan belum banyak mengkaji program tersebut dari perspektif *public value*, khususnya di Kecamatan Watulimo yang merupakan wilayah pesisir dengan jumlah masyarakat terlayani relatif tinggi. Padahal, pelaksanaan Mening Deh masih menghadapi beberapa persoalan, seperti penyebaran informasi yang belum merata, tidak semua perangkat daerah hadir pada setiap kegiatan, serta dasar hukum program yang masih terbatas pada surat edaran.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis public value pada pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menggunakan teori *public value* Mark H. Moore.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis *public value* pada pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Lokus penelitian dipilih karena Kecamatan Watulimo merupakan salah satu wilayah dengan jumlah masyarakat penerima layanan Mening Deh yang relatif tinggi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Sekretaris

Kecamatan Watulimo, perangkat Desa Gemaharjo dan Desa Tasikmadu, pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, serta masyarakat penerima layanan.

Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder berupa dokumen pendukung, seperti surat edaran, laporan pelaksanaan program, dan dokumentasi kegiatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Sugiyono 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) merupakan inovasi pendekatan pelayanan publik dari perangkat daerah se-Kabupaten Trenggalek yang dihadirkan langsung ke desa dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan, serta menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat. Public value merupakan pemikiran serta tindakan strategis yang dilakukan oleh pembuat kebijakan publik dan manajer guna menyelesaikan berbagai persoalan kompleks dalam pelayanan publik pada suatu wilayah (Moore, 1995). Analisis public value pada pelayanan Mening Deh di Kecamatan Watulimo dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu legitimacy and support, operational capabilities, dan substantively valuable.

1. *Legitimacy and Support* (Legitimasi dan Dukungan)

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo telah memperoleh legitimasi melalui dukungan regulasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan akses pelayanan publik. Program ini pada awalnya diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Trenggalek dan selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 yang mengatur tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan program. Selain memperoleh legitimasi formal, pelaksanaan Mening Deh juga didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

   Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui keterlibatan 33 perangkat daerah yang menyediakan 241 jenis pelayanan dalam setiap pelaksanaan Mening Deh. Pemerintah desa turut berperan dalam memfasilitasi lokasi kegiatan, membantu penyebaran informasi kepada masyarakat, serta mengoordinasikan kebutuhan pelaksanaan pelayanan. Dari sisi masyarakat, respons terhadap program cenderung positif karena pelayanan yang diberikan mampu menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses menuju kantor perangkat daerah. Kehadiran berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan secara lebih cepat, efisien, dan terpadu.

   Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa aspek legitimasi masih menghadapi beberapa kendala. Program Mening Deh belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan sehingga setiap perangkat daerah masih mengacu pada SOP masing-masing. Selain itu, penyebaran informasi mengenai jadwal dan jenis pelayanan belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat mengetahui pelaksanaan kegiatan setelah memperoleh informasi dari pemerintah desa atau ketika kegiatan telah berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi sosialisasi masih perlu ditingkatkan

agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan pelayanan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi *legitimacy and support* dalam *Strategic Triangle* Mark H. Moore telah terpenuhi. Moore (1995) menjelaskan bahwa organisasi publik dapat menciptakan *public value* apabila memperoleh legitimasi dan dukungan dari pemerintah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Pada program Mening Deh, legitimasi diwujudkan melalui adanya dasar hukum penyelenggaraan program, sedangkan dukungan tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan. Dukungan tersebut menjadi faktor penting yang memungkinkan program berjalan secara berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, Moore juga menegaskan bahwa legitimasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga kemampuan organisasi publik membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, belum tersedianya SOP khusus serta belum optimalnya sosialisasi menunjukkan bahwa legitimasi administratif dan dukungan publik masih perlu diperkuat. Penyusunan SOP yang terintegrasi dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang seragam, sedangkan strategi sosialisasi yang lebih luas akan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Vanessa et al. (2026) yang menyatakan bahwa Mening Deh telah memperoleh komitmen kuat dari pimpinan daerah, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi teknis dan struktur kelembagaan. Temuan ini juga memperkuat pandangan Moore (1995) bahwa penciptaan *public value* bergantung pada keseimbangan antara legitimasi formal, dukungan para pemangku kepentingan, dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penguatan regulasi teknis serta optimalisasi sosialisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan Mening Deh sehingga nilai publik yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kecamatan Watulimo.

2. *Operational Capabilities* (Kemampuan Operasional)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Mening Deh telah didukung oleh kemampuan operasional yang memadai melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek berperan sebagai koordinator pelaksanaan program, sedangkan setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyediakan jenis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian peran tersebut memungkinkan berbagai layanan publik dapat diberikan secara terpadu dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kantor perangkat daerah secara terpisah.

Kemampuan operasional program juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dari masing-masing perangkat daerah yang terlibat dalam pelayanan. Setiap perangkat daerah menugaskan pegawai sesuai kompetensi untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan mampu menciptakan kesamaan persepsi mengenai pembagian tugas, jadwal pelayanan, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan Mening Deh.

Berdasarkan perspektif *Strategic Triangle*, Moore (1995) menjelaskan bahwa penciptaan *public value* memerlukan kemampuan operasional organisasi dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, serta memanfaatkan teknologi dan anggaran secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi *operational capabilities* pada Program Mening Deh telah terpenuhi melalui koordinasi lintas sektor, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan

sumber daya manusia yang kompeten. Kemampuan tersebut memungkinkan pelayanan publik tetap dapat diberikan kepada masyarakat meskipun dilaksanakan di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang.

Namun demikian, Moore (1995) juga menekankan bahwa kemampuan operasional harus terus dikembangkan agar organisasi publik mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, kendala jaringan internet, cuaca, dan kondisi geografis menunjukkan bahwa kapasitas operasional Mening Deh masih memerlukan penguatan, khususnya melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan alternatif jaringan komunikasi, serta perencanaan operasional yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Rahaju (2022) yang menyatakan bahwa kondisi geografis Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik, terutama pada layanan jemput bola. Penelitian Lestari et al. (2025) juga menunjukkan bahwa gangguan jaringan internet masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, penguatan kapasitas operasional melalui peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Mening Deh dalam menciptakan *public value*.

3. *Substantively Valuable* (Nilai Substansial)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Mening Deh telah menghasilkan nilai substansial (*substantively valuable*) bagi masyarakat Kecamatan Watulimo. Nilai tersebut tercermin melalui manfaat yang dirasakan masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan ekologi. Kehadiran berbagai layanan publik secara terpadu di tingkat desa memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pegunungan, untuk memperoleh pelayanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelayanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada aspek sosial, Mening Deh berhasil meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat, dekat, dan terpadu. Pelayanan yang dilaksanakan langsung di desa mampu mengurangi hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat Kecamatan Watulimo. Selain itu, interaksi antara pemerintah dan masyarakat selama pelaksanaan program turut memperkuat hubungan sosial serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan jemput bola mampu memperkuat kedekatan pemerintah dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima.

Dari aspek politik, program Mening Deh mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran pemerintah secara langsung di desa memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan secara adil. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada aspek ekonomi, pelaksanaan Mening Deh memberikan manfaat berupa penghematan biaya transportasi, waktu, dan pengeluaran masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan

administrasi maupun pelayanan lainnya. Masyarakat tidak lagi harus melakukan perjalanan ke pusat pemerintahan kabupaten sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat sekitar untuk memasarkan produk lokal selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, program tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, nilai pendidikan tercermin melalui meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan publik, pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, serta informasi mengenai layanan kesehatan, sosial, dan program pemerintah lainnya. Edukasi yang diberikan oleh petugas selama pelayanan berlangsung membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai penerima pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi.

Sementara itu, pada aspek ekologi, pelaksanaan Mening Deh turut mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh beberapa perangkat daerah, seperti edukasi lingkungan, pembagian bibit tanaman, serta pemanfaatan produk ramah lingkungan pada beberapa kegiatan. Meskipun nilai ekologi belum menjadi fokus utama program, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Berdasarkan perspektif *Strategic Triangle*, Moore (1995) menjelaskan bahwa organisasi publik dikatakan berhasil menciptakan *public value* apabila pelayanan yang diberikan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mening Deh telah memenuhi dimensi *substantively valuable* karena manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan dalam bentuk kemudahan memperoleh pelayanan, tetapi juga memberikan dampak sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan ekologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai publik yang dihasilkan bersifat multidimensional dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanah et al. (2024) yang menyatakan bahwa *public value* dalam pelayanan publik tercermin melalui manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan. Selain itu, hasil penelitian juga memperkuat pandangan Moore (1995) bahwa keberhasilan suatu inovasi pelayanan publik tidak hanya diukur dari efisiensi penyelenggaraannya, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu menciptakan nilai yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Mening Deh dapat dipandang sebagai inovasi pelayanan publik yang berhasil menciptakan *public value* melalui peningkatan akses pelayanan sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Kecamatan Watulimo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah mampu menciptakan *public value* berdasarkan tiga dimensi *Strategic Triangle* Mark H. Moore, yaitu *legitimacy and support*, *operational capabilities*, dan *substantively valuable*. Dimensi *legitimacy and support* tercermin melalui adanya dukungan regulasi serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemerataan sosialisasi. Pada dimensi *operational capabilities*, koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tugas, serta pemanfaatan sumber daya telah mendukung pelaksanaan program, walaupun masih dihadapkan pada kendala jaringan internet, kondisi cuaca, dan karakteristik geografis wilayah. Sementara itu, dimensi *substantively valuable* menunjukkan bahwa Mening Deh mampu memberikan nilai sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan ekologi

yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan publik.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep *Strategic Triangle* Mark H. Moore bahwa penciptaan *public value* tidak hanya bergantung pada legitimasi dan kapasitas organisasi, tetapi juga pada kemampuan program menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis jemput bola dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperluas akses pelayanan pada wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Trenggalek disarankan untuk menyusun SOP khusus sebagai pedoman pelaksanaan Mening Deh, memperkuat strategi sosialisasi agar informasi program menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan dukungan infrastruktur teknologi guna meminimalkan kendala jaringan selama pelayanan berlangsung. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian *public value* pada inovasi pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, memperluas lokasi penelitian, maupun membandingkan implementasi program serupa di daerah lain sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penciptaan *public value*.

DAFTAR REFERENSI

BPSDM Komdigi. 2025. “Detail Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten/Kota 2025.” *Imdi.Sdmdigital.Id*. Retrieved November 16, 2025 (https://imdi.sdmdigital.id/home).

Hasanah, Tamimatul, Inda Riana, Siska Rahayu Indri Tazkiya, Putri Indriani, Idhotun Nafiah, and Eko Prasetyo. 2024. “Penggunaan KTP Elektronik (KTP-EL) Dilihat Dari Perspektif Public Value Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.” *Karimah Tauhid* 3(8):8311–30.

Lestari, Nia Ayu, Lusiana Lusiana, and Anang Sugeng Cahyono. 2025. “Inovasi Pelayanan Publik Dispendukcapil Melalui Aplikasi Siminaksopal Dan Program Jempol Keren Kabupaten Trenggalek.” *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)* 2(2):512–29. doi: 10.70248/jogapa.v2i2.1685.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Moore, Mark H. 1995. *Creating Public Value Strategic Managementin Government*. London: Harvard University Press.

Pratama, Dika Yoga, and Tjitjik Rahaju. 2022. “Implementasi Inovasi Layanan Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek).” *Journal Publika* 10(2):621–36. doi: 10.26740/publika.v10n2.p621-636.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. edited by Sutopo. Bandung: Penerbit ALFABETA.

Supriyanto, Supriyanto, Andriyanto Andriyanto, and Zainiyah Alfirdaus. 2023. “Inovasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek.” *Media Bina Ilmiah* 17(9):2263–72.

Vanessa, Andini Assifatu, Trenda Altiva Oktariyanda, Meirinawati Meirinawati, and Eva Hany Fanida. 2026. “Inovasi Pelayanan Program Mening Deh (Mending Makaryo Ning Desa , Desa Hebat) Di Kecamatan Trenggalek , Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus : Desa Karangsoko).” *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 1(2):902–20.